BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

Nomor : 019 /HK.01.00/K.SN-22/06/2022 20 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
hal : **Himbauan**

Yth. **Walikota Makassar**
Di,
Tempat

I. Dasar:
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

II. Bahwa dengan memperhatikan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah berlangsung sejak tanggal 14 Juni 2022, dengan ini Bawaslu Kota Makassar mengharapkan kepada Bapak Walikota Makassar untuk dapat berperan aktif dalam menjaga netralitas ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Makassar melalui himbauan-himbauan dan atau sarana lainnya yang berguna untuk memastikan terwujudnya ASN/PNS yang netral dan Profesional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
3. MenpanRB di Jakarta
4. Mendagri di Jakarta
5. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Arsip